

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH BAGI KORBAN BENCANA DI KELURAHAN
PESAWAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Studi Di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar
Lampung)

SKRIPSI

Oleh

DETA PUTIE ANDAM ZAHRANI

NPM 2016011056



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH BAGI KORBAN BENCANA DI KELURAHAN
PESAWAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Studi Di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar
Lampung)

Oleh

DETA PUTIE ANDAM ZAHRANI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK
IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH BAGI KORBAN BENCANA DI KELURAHAN
PESAWAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

(Studi Di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar
Lampung)

Oleh:

Deta Putie Andam Zahrani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bantuan sosial korban bencana dan strategi pengelolaan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya hanya sementara dan selektif, yang bertujuan untuk membantu kehidupan korban pasca terjadinya bencana. Ketika bantuan sosial ini sudah dapat membantu kehidupan korban pasca bencana, maka hal itu dapat mengurangi risiko kerentanan sosial di masyarakat. Bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk tunai maupun nontunai kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Bantuan sosial ini juga merupakan salah satu dari kebijakan sosial yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan dan terkena dampak dari suatu bencana, contohnya bencana banjir di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Kebijakan sosial ini dibentuk dalam rangka untuk menangani masalah sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini melibatkan 12 orang informan yang terdiri dari 2 aparat pemerintah desa yang bertanggung jawab, 5 masyarakat penerima bantuan sosial 2 tahun terakhir dan 5 masyarakat yang baru saja atau akan mendapatkan bantuan sosial. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan meliputi tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan tunai, nontunai, dan sembako. Strategi pengelolaan bantuan sosial dengan cara membuat skala prioritas kebutuhan seperti untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan memperbaiki barang.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Implementasi, Bencana, Strategi.

ABSTRACT
**IMPLEMENTATION OF SOCIAL ASSISTANCE PROVIDED BY THE
GOVERNMENT FOR DISASTER VICTIMS IN KELURAHAN PESAWAHAN,
BANDAR LAMPUNG CITY**

(Study in Pesawahan Village, Teluk Betung Selatan Subdistrict, Bandar Lampung City)

By:

Deta Putie Andam Zahrani

This study aims to determine the implementation of social assistance for disaster victims and social assistance management strategies in Bandar Lampung City. Social assistance provided by the government is only temporary and selective, which aims to help the lives of victims after a disaster. When this social assistance can help the lives of victims after a disaster, it can reduce the risk of social vulnerability in the community. This social assistance is provided in cash and non-cash to individuals, families, groups and communities. This social assistance is also one of the social policies provided by the government for people in need and affected by a disaster, for example the flood disaster in Pesawahan Village, Teluk Betung Selatan subdistrict, Bandar Lampung City. This social policy was formed in order to deal with social problems. This research uses a qualitative method descriptive approach. This research involved 12 informants consisting of 2 responsible village government officials, 5 community members who received social assistance in the last 2 years and 5 community members who have just received or will receive social assistance. The result of this research is that the implementation of assistance includes stages, starting from planning, budgeting, and implementation. The assistance provided by the government is in the form of cash, non-cash, and basic food assistance. Social assistance management strategies by prioritizing needs such as meeting basic daily needs and repairing goods.

Keywords: *Social Assistance, Implementation, Disaster, Strategy.*

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH BAGI KORBAN BENCANA DI KELURAHAN PESAWAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Deta Putie Andam Zahrani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016011056

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A.

NIP. 19860913 201903 2 010

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A.** 

Penguji Utama : **Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si.** 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Ujian Sidang Skripsi: **20 Agustus 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2) Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
- 3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4) Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Deta Putie Andam Zahrani

NPM. 2016011056

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Deta Putie Andam Zahrani, dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 08 November 2002 yang merupakan anak tunggal, putri dari pasangan Bapak Mahmuddin (Alm) dan Ibu Dedek Apriyani.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Kemala Bhayangkari pada tahun 2008, pendidikan dasar di SD Pertiwi Teladan Metro pada tahun 2014, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Metro pada tahun 2017 dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Metro pada tahun 2020. Kemudian penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di perguruan tinggi Universitas Lampung, melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi pada divisi Minat dan Bakat, dan Koperasi Mahasiswa (KOPMA). Pada tahun 2023 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Marga, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 6 bulan pada tanggal 10 Agustus 2023 – 10 Januari 2024 di Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Provinsi Lampung.

MOTTO

“Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur.”

(Q.S Al-An'am: 164)

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi.”

(Ali bin Abi Thalib)

“First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare.”

(Walt Disney)

“Buatlah mereka yang kalian sayang sukacita selamanya, karena menyesal tidak ada penyembuhannya”

(Deta Putie Andam Zahrani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Terimakasih atas segala bentuk nikmat dan karunia yang telah engkau berikan kepadaku ya Rabb.

Skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat, berkat, karunia, serta pertolongan yang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya kecil dan segala perjuangan hingga titik ini penulis persembahkan kepada dua orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis sekaligus sebagai tanda bukti kasih sayang yang tiada tara, yaitu kepada Kedua Orang tuaku

Papi dan Mami Tercinta

Terimakasih karena telah merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus dan penuh keikhlasan. Terima kasih juga atas segala kasih sayang dan cintanya selama ini, serta atas do'a dan semangat yang tidak pernah henti, serta dukungan baik moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis dari penulis kecil hingga saat ini.

Dan juga penulis persembahkan rasa terima kasih ini kepada keluarga besar yang selama ini telah memberikan support, bantuan, kasih sayang dan motivasi kepada penulis. Terima kasih juga karena selalu ada untuk penulis pada saat melewati masa-masa yang sulit ini.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Bantuan Sosial Yang Diberikan Oleh Pemerintah Bagi Korban Bencana Di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung (Studi Di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki. Data yang tercantum dalam skripsi ini masih perlu digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan penulis kekuatan, kesehatan dan ilmu pengetahuan serta memberikan penulis kemudahan yang pada akhirnya karya sederhana ini dapat selesai dengan tepat waktu.
2. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Mahmuddin (Alm) dan Ibu Dedek Apriyani. Penulis sangat berterimakasih karena telah menjadi *support system* terbaik, yang selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, dukungan, motivasi, pengorbanan, kasih sayang yang tulus dan selalu memfasilitasi segala kebutuhan penulis. Papi dan mami adalah salah satu alasanku untuk tetap bertahan selama ini dan menjadi salah satu tujuan hidupku. Semoga kelak deta bisa membanggakan papi dan mami. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, kesehatan, perlindungan serta limpahan rahmat kepada papi dan mami yang sangat penulis cintai.

3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S..E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
7. Bapak Damar Wibisono, S. Sos., M. A., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
8. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si., selaku dosen pembahas, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas kritik, saran dan masukan yang telah Ibu berikan selama menjadi dosen pembahas, tentunya membuat penulis termotivasi untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik lagi, sehingga penulis dapat melaksanakan sidang akhir. Semoga Allah SWT memberikan Ibu kesehatan, perlindungan, rezeki serta limpahan rahmat.
9. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu mengarahkan dan membimbing serta memberikan saran dan kritik yang membangun dengan penuh kesabaran kepada penulis selama masa pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan Ibu kesehatan, perlindungan, rezeki serta limpahan rahmat.
10. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih telah menjadi pembimbing akademik yang baik, penuh kesabaran, mengarahkan, serta bersedia membimbing penulis selama dibangku perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Staff administrasi Jurusan Sosiologi, Mas Edy dan Mas Daman yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian surat dan berkas selama perkuliahan sampai sidang akhir.

13. Untuk sepupu-sepupu tercinta penulis, Mba Iren, Bang Ferdian, Adek Yoga, Bimbi, Zahra, dan Bobot yang selalu memberi dukungan, dan kata-kata manis kepada penulis ketika masa sulit.
14. Untuk teman-teman Sosiologi 2020 yang telah memberikan kenangan, dukungan, kebersamaan dan ilmu selama berproses di masa perkuliahan.
15. Sahabat-sahabatku, landani genk, Rene, Billa, Disa, Zahra dan Onel terima kasih karena selalu memberikan sukacita dan kegembiraan selama masa perkuliahan ini. Terima kasih karena sudah mau menjadi sahabat yang bersedia mendampingi dan mendukung tanpa merasa tersaingi satu sama lain selama 2 tahun ini, walaupun selama ini penulis kadang agak nyebelin dan suka banyak ngomong, banyak galaunya juga tapi percayalah penulis benar-benar menyayangi kalian semua! *Remember that*. Semoga semua yang kita impikan tercapai satu persatu. Ingat, kita harus jadi *independent woman* yang mahal dan bersahaja. *See you in the future my lovely friends, I Love you guys so much*.
16. Teman-teman KKN Desa Suka Marga 2 yang sudah memberikan kenangan indah selama 40 hari.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2024
Penulis,

Deta Putie Andam Zahrani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Tentang Implementasi	17
2.2. Tinjauan Tentang Bantuan Sosial	18
2.3. Tinjauan Tentang Bencana	22
2.4. Tinjauan Tentang Risiko Kerentanan Sosial	25
2.5. Landasan Teori.....	27
2.6. Kajian Penelitian Terdahulu	31
2.7. Kerangka Berpikir.....	34
III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Tipe Penelitian	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	38
3.3. Fokus Penelitian.....	38
3.4. Kriteria Informan	39
3.5. Sumber Data.....	41
3.6. Teknik Pengumpulan Informasi	42
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Bandar Lampung	46
4.2. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung.....	47

4.3.	Kondisi Topografi Kota Bandar Lampung.....	49
4.4.	Gambaran Umum Wilayah Teluk Betung Selatan	51
4.5.	Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Pesawahan	53
4.6.	Kerawanan Bencana di Kota Bandar Lampung.....	56
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	58
5.1.	Hasil Penelitian	58
5.2.	Profil Informan.....	58
5.3.	Implementasi Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Bagi Korban Bencana Di Kota Bandar Lampung	61
5.4.	Efektivitas Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Bandar Lampung	69
5.5.	Pengurangan Risiko Kerentanan Sosial di Masyarakat	74
5.6.	Hasil Observasi Penelitian	77
5.7.	Keterkaitan Antara Teori Struktural Fungsional dengan Implementasi Bantuan Sosial yang Diberikan Oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Bagi Korban Bencana	79
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	84
6.1.	Kesimpulan	84
6.2.	Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3. 1 Profil Informan.....	38
Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Kepdatan Penduduk Kota Bandar Lampung.....	45
Tabel 4. 2 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan Menurut Kelurahan 2020-2022.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Jenis Bencana Menurut Undang-undang No 24 Tahun 2007	9
Gambar 1. 2 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2022...	12
Gambar 1. 3 Piramida Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	13
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	33
Gambar 5. 1 Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana di RT 47.....	61
Gambar 5. 2 Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana di RT 44.....	65
Gambar 5. 3 Observasi Rumah Warga Pasca Bencana.....	73
Gambar 5. 4 Sisa Lumpur dan Sampah Pasca Banjir.....	73
Gambar 5. 5 Kebersihan Lingkungan di Gudang Agen Kelurahan Pesawahan.....	74

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai macam bentuk program dari bantuan sosial yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bantuan Sosial Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (Kominfo, 2018). Bantuan sosial juga merupakan salah satu dari kebijakan sosial yang diberikan oleh Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan dan terkena dampak dari suatu bencana. Kebijakan sosial adalah suatu keputusan yang diambil untuk menangani masalah sosial. Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, yaitu "Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang yang bersumber dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari risiko sosial".

Dalam Perpres No. 63 Tahun 2017, bantuan sosial dapat berupa bantuan uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial. Risiko sosial merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kerentanan sosial yang dialami oleh seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai akibat dari krisis sosial, krisis ekonomi, fenomena alam, atau bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang memadai.

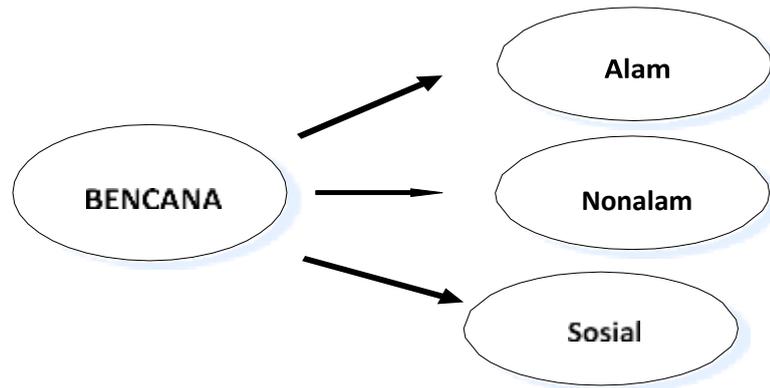
Habibullah (2010) mendefinisikan kebijakan sosial diantaranya yaitu:

- 1) Kebijakan pemerintah yang memengaruhi kesejahteraan warga negara secara langsung melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshal dalam Habibullah, 2010).
- 2) Perencanaan untuk mengatasi biaya sosial, peningkatan pemerataan, pendistribusian pelayanan, dan bantuan sosial (Rein dalam Habibullah, 2010).
- 3) Pendekatan, tindakan, atau rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman dalam Habibullah, 2010).
- 4) Bagian dari kebijakan publik (Kebijakan publik meliputi semua kebijakan pemerintah, seperti ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), dan fasilitas umum seperti listrik dan air bersih. Sementara kebijakan sosial adalah kebijakan publik yang ditujukan untuk tujuan sosial (Magil dalam Habibullah, 2010).
- 5) Kebijakan kesejahteraan (*welfare*), baik dalam arti luas yang mencakup kualitas hidup manusia maupun dalam arti sempit yang mencakup berbagai jenis pelayanan kolektif yang dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan rakyat (Spicker dalam Habibullah, 2010).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), bantuan sosial adalah bantuan yang ditujukan pada rumah tangga segmen terbawah dengan tujuan membantu masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, dan mengurangi disinsentif tenaga kerja. Bantuan sosial diberikan tanpa syarat yang rumit atau kewajiban tertentu bagi penerimanya namun, manfaat tersebut berupa program jaminan sosial, tanpa asuransi sosial dan tanpa pembayaran atau kontribusi dari penerimanya (Supriyanto, Ramdani, dan Rahmadan 2014: 9). Salah satu tujuan implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik adalah untuk mencapai hasil yang akan dinikmati terutama oleh kelompok sasaran. Proses pembuatan kebijaksanaan memerlukan rasa tanggung jawab yang tinggi serta keinginan untuk mengambil risiko dan mengambil inisiatif. Selain itu, ada banyak tantangan juga, terutama jika informasi yang dibutuhkan tidak lengkap, bukti yang ada tidak dapat memberikan gambaran kesimpulan, ramalan hasil yang tidak jelas, komentar sporadic, proses yang sulit dipahami, dan kurangnya partisipasi (Thoha, 2015:54).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun manusia. Bencana ini dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan konsekuensi psikologis. Adapun pengertian lain dari bencana yaitu gangguan yang signifikan terhadap keberfungsian sistem di masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dalam hal materi, ekonomi, atau lingkungan, dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (UU No. 24 Tahun 2007).

Gambar 1. 1 Jenis Bencana Menurut Undang-undang No 24 Tahun 2007



Sumber: BNP Bencana, 2018 diambil

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam atau serangkaian kerja alam yang terjadi tanpa sengaja atau tanpa rencana. Bencana alam dapat berupa tsunami, banjir, longsor, gempa bumi, angin kencang, gunung meletus dan lain sebagainya. Bencana nonalam yaitu bencana yang disebabkan oleh kejadian atau kumpulan kejadian nonalam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (pandemi). Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh manusia. Contoh bencana sosial akibat ulah manusia ini seperti teror dan konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat (ISDR, 2004).

Pendekatan antropologis menurut Oliver-Smith tahun 1979 dan 1986, Hansen & Oliver-Smith tahun 1982 mengutamakan dampak bencana terhadap evolusi sosio-ekonomi suatu populasi. Para antropolog mencoba menjelaskan mengapa komunitas di dunia ketiga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, mereka membahas *marginalization syndrome* atau sindrom marginalisasi yang merupakan penyebab "pemiskinan" kelompok-kelompok yang rentan di negara-negara dunia ketiga. Dalam sepuluh tahun terakhir, kajian bencana

telah mengalami pergeseran fokus. Sebelumnya, kajian tentang bencana ini lebih banyak memfokuskan pada masalah teknis terkait peristiwa yang memicu terjadinya bencana, dan sekarang berfokus pada pendekatan manusia dan masyarakat. Hal ini menghasilkan gagasan tentang pengelolaan bencana sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat (Twig & Batt, 1998; Shaw & Okazaki, 2003). Maskrey (1989) juga menyatakan bahwa pengelolaan bencana seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat lokal yang rentan dan terkena dampak bencana, bukan hanya dengan menggunakan pendekatan fisik sesaat. Pendekatan sosiologis dari Drabek, 1986 mendiskusikan tentang kerentanan dan dampak bencana pada pola perilaku manusia dan pengaruhnya atas fungsi struktur di masyarakat dan organisasi.

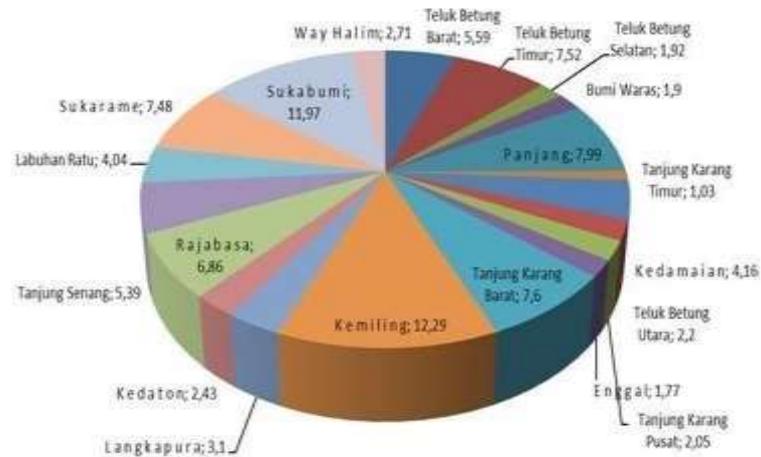
Berdasarkan perspektif sosiologis, bencana biasanya dipahami berdasarkan persepsi individu atau masyarakat terhadap peristiwa yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Pemerintah sebagai orang atau entitas di luar masyarakat yang mempengaruhi cara masyarakat melihat dan mendefinisikan bencana. Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai bencana apabila ditandai dengan terjadinya kerusakan pola sistem sosial dan ekonomi komunitas masyarakat yang normal dan telah ada sebelumnya. Sesuatu mungkin akan tampak terlihat kembali normal atau kembali seperti semula ketika pasca bencana atau bencana telah usai. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki pengetahuan dan strategi mereka masing-masing untuk menangani lingkungan mereka agar mereka dapat bertahan hidup. Pengetahuan dan pendekatan ini disebut sebagai "*wisdom to cope with the local events*", atau sering disebut "*local wisdom*".

Pemberian bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang mengalami bencana berbeda-beda disetiap daerah. Pemberian bantuan banjir oleh pemerintah Jakarta kepada masyarakat yang menjadi

korban bencana seperti mendirikan posko pengungsian dan mengirimkan bantuan darurat. Perbaikan infrastruktur dan evaluasi sistem drainase sedang dilakukan. Pemerintah Papua memiliki cara berbeda dengan pemerintah Jakarta untuk mendistribusikan bantuan sosial yaitu dengan mengirimkan makanan dan obat-obatan serta perbaikan infrastruktur. Perbedaan pemberian bantuan ini dilihat dari prioritas kebutuhan korban bencana.

Di Indonesia telah terjadi banyak kasus bencana alam. Menurut *World Risk Report* Indonesia masuk ke dalam peringkat ke 3 dengan negara yang rawan akan bencana. Salah satu Provinsi yang tinggi akan kasus bencana yaitu provinsi Lampung. Provinsi Lampung masuk kategori risiko tinggi secara nasional. Berdasarkan Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Januari 2022, provinsi Lampung berada di urutan 16 dari 35 provinsi di Indonesia dan urutan ke 5 tertinggi di Sumatera. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus Ibu Kota provinsi dan kota terbesar di provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332/km². Secara geografis Kota Bandar Lampung ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta yang memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatra begitupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa (berdasarkan hasil sensus penduduk 2020). Sedangkan menurut Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 1.096.936 jiwa pada pertengahan tahun 2023. (Universitas STEKOM, 2023).

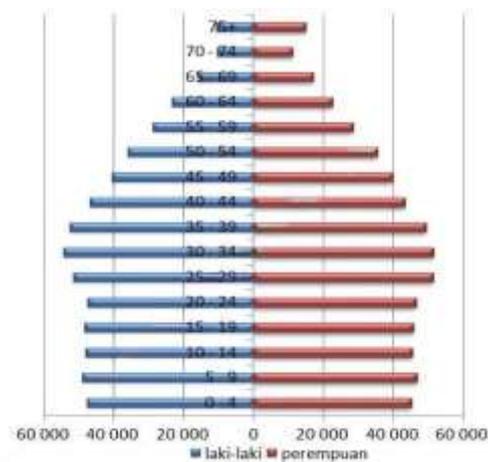
Gambar 1. 2 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2022



Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Bandar Lampung (PKP Kota Bandar Lampung)

Pada Tahun 2022, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.209.937 jiwa dengan sex ratio 104, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni sebanyak 22.018 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya di Kota Bandar Lampung adalah Kecamatan Sukabumi yaitu sebesar 3.336 jiwa/km².

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Akibat dari banyaknya kasus bencana alam di Kota Bandar Lampung menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada penduduk atau masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut. Pesawahan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Kelurahan pesawahan merupakan area yang padat penduduk dan termasuk wilayah urban Bandar Lampung. Seperti banyak daerah urban lainnya, Kelurahan Pesawahan menghadapi tantangan terkait dengan pengelolaan sampah, kualitas udara, dan pemanfaatan lahan. Kelurahan Pesawahan, sebagai bagian dari Kota Bandar Lampung, memiliki topografi yang mempengaruhi risiko banjir. Wilayah dengan rendahnya elevasi dan sistem drainase yang tidak memadai cenderung lebih rentan terhadap genangan air saat curah hujan tinggi. Sistem drainase yang tidak memadai ditambah timbunan sampah di saluran drainase menjadi faktor terjadinya banjir.

Bencana tidak mengenal waktu dan bisa datang kapan saja. Bencana banjir sering terjadi di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat yang terkena bencana dengan

memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar korban bencana ini biasanya diberikan dalam bentuk uang atau tunai. Bantuan sosial berupa uang yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sementara dan mengurangi beban penderitaan korban bencana yang terkena dampak dari bencana alam tersebut. Bantuan sosial ini juga dapat mengurangi kerentanan risiko sosial korban bencana, sehingga korban bencana dapat melangsungkan hidup dengan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi dari bantuan sosial di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung dapat berjalan sesuai dengan SOP atau tidak, dan bagaimana korban bencana dapat mengelola bantuan sosial yang sudah diberikan oleh Pemerintah bagi sistem kehidupan mereka. Gap permasalahan dari penelitian ini yaitu apakah instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas bantuan sosial ini dapat berfungsi dengan baik atau tidak di masyarakat korban bencana, jika tidak berfungsi disini berarti struktur atau sistemnya yang seharusnya diubah atau di alih fungsikan atau masyarakatnya yang seharusnya mengikuti dan memahami program yang sudah ada. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Bantuan Sosial Yang Diberikan Oleh Pemerintah Bagi Korban Bencana Di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung (Studi Di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi bantuan sosial bagi korban bencana di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana kebermanfaatan yang diperoleh dari bantuan sosial bisa terlaksana dengan menggunakan strategi pengelolaan bantuan sosial yang diterapkan oleh korban bencana di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung bagi kehidupan korban bencana di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kebermanfaatan yang diperoleh dari bantuan sosial dapat terlaksana atau tidak dengan menggunakan strategi pengelolaan bantuan sosial yang diterapkan oleh korban bencana di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sosial khususnya ilmu sosiologi tentang bagaimana implementasi pemerintah dalam memberikan bantuan sosial bagi korban bencana di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh korban bencana dan kebermanfaatan dari bantuan sosial yang telah diberikan bagi kehidupan korban bencana di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi penelitian selanjutnya tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada mengenai bantuan sosial bagi korban bencana. Dan juga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan ilmu dan informasi bagi masyarakat luas tentang implementasi, kebermanfaatan serta strategi yang dilakukan baik oleh korban bencana maupun instansi pemerintah kota dalam mengintervensikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat yang terkena dampak dari bencana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam suatu keputusan. Tindakan ini diusahakan untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang

berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2. Tinjauan Tentang Bantuan Sosial

Bantuan sosial atau biasa dikenal dengan sebutan bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk bantuan kepada lembaga non-pemerintah dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Bantuan ini tidak selektif dan tidak terus menerus. Bantuan sosial bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat” yang diberikan melalui Kementerian atau Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bantuan sosial dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang tunai atau barang (Permensos No. 01 Tahun 2019).

Beberapa jenis bantuan sosial yang disediakan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB). Yang pertama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan berupa pangan senilai Rp 200.000 per bulan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan/atau susu. Yang kedua Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota rentan seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Ketiga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan adalah bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 yang diberikan kepada 18,8 juta KPM yang terdampak bencana alam. Dan yang terakhir Bantuan Sosial Beras (BSB) adalah bantuan berupa beras seberat 10 kg yang diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam DTKS Kemensos.

Secara normatif definisi mengenai bantuan sosial diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 tentang bantuan sosial yaitu, “bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidakmampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.”

Mengenai subjek dari penerima bantuan sosial juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Penerima bantuan sosial antara lain seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Upaya untuk mengurangi penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial seseorang, keluarga, atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dikenal sebagai bantuan sosial. Ini juga akan mendorong kemampuan seseorang, keluarga, atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial untuk tetap hidup secara wajar. Anda dapat memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Pemberian bantuan sosial di Kota Bandar Lampung dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, pemberian bantuan diatur oleh dalam Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan kerangka kerja untuk mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan dari bencana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur bahwa pemerintah berkewajiban memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan

untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Bencana yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung.

Bantuan sosial dibagi menjadi kategori sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial sementara adalah bantuan yang tidak perlu dianggarkan setiap tahun dan dapat dihentikan apabila penerima telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak lagi termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan perawatan fakir miskin adalah bagian dari penyelenggaraan bantuan sosial.

Anggota atau kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial sebagaimana sudah diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 23 :

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
2. Lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 24 menjelaskan pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Selektif, bahwa bantuan sosial yang hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk

melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial, yaitu penerima bantuan sosial harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dapat diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Sesuai tujuan penggunaan, sebagaimana dimaksud tujuan pemberian sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b. Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c. Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Di Indonesia, tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial. Pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara mandiri, termasuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial di wilayahnya dengan mengalokasikan dana untuk hibah dan bantuan sosial. Pelaksanaan ini telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Kepala Daerah.

2.3. Tinjauan Tentang Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Ramli, 2010). Bencana adalah peristiwa atau kejadian potensial yang merupakan ancaman terhadap kesehatan, keamanan atau kesejahteraan masyarakat atau fungsi ekonomi masyarakat maupun kesatuan organisasi pemerintah yang lebih luas (Fitriadiet al. 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan karena faktor alam, faktor nonalam, dan faktor manusia. Kejadian tersebut menyebabkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan

atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, bahaya, dalam bahaya, dalam kecelakaan, gangguan, godaan (Hasan, 2007).

Menurut Ramli (2010), bencana diklasifikasi atas 3 macam sebagai berikut :

1). Bencana Alam

Yaitu bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti letusan gunung api, banjir, pemanasan global, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Bencana alam terjadi hampir sepanjang tahun diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia (Ramli, 2010).

2). Bencana Nonalam

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.

3). Bencana Sosial

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Bencana dapat terjadi dari mana saja, setiap bencana memiliki durasi yang berbeda dan dapat terjadi secara mendadak seperti guncangan, wabah penyakit, gempa bumi, konflik. Bencana juga bisa terjadi karena adanya suatu tekanan yang terjadi secara terus menerus, seperti kekeringan, degradasi sumber daya alam, urbanisasi yang tidak terencana, perubahan iklim, ketidakstabilan politik dan terjadi penurunan pada sektor ekonomi (Twigg, 2015). Bencana adalah gangguan serius yang berdampak langsung terhadap hidup suatu komunitas atau masyarakat seperti kerugian secara material, kerusakan lingkungan dan kejadian bencana tersebut mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan sumber daya sendiri (*Asian Disaster Reduction*, 2009). Fenomena bencana muncul karena adanya komponen pemicu (*trigger*), ancaman (*hazard*), risiko (*risk*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang saling berkaitan

sehingga menyebabkan munculnya risiko terhadap komunitas dalam suatu wilayah (*United Nations Development Programme and Government of Indonesia*, 2012).

a. Risiko

Kemungkinan bencana dan korban masal terkait dengan berbagai fenomena berbahaya, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan konflik (Posponegoro & Sujudi, 2016).

b. Ancaman

Hazard adalah kejadian yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa, kerusakan harta benda, kehilangan rasa aman, kelumpuhan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan efek psikologis. Risiko belum selalu mengakibatkan malapetaka. Jika bahaya dan ancaman berinteraksi, bencana akan terjadi. Ini adalah apa yang disebut sebagai insiden antara orang, lingkungan, atau harta benda dengan bahaya yang menyebabkan kerusakan (Pusponegoro & Sujudi, 2016).

c. Kerentanan (*vulnerability*)

Kondisi masyarakat atau komunitas yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan untuk menghadapi ancaman bahaya dikenal sebagai kerentanan. Kondisi ini terdiri dari dua komponen: kerawanan, juga disebut ketahanan, dan ketahanan.

Bencana didefinisikan sebagai pertemuan dari tiga elemen: ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh peristiwa. Tiga komponen penting bencana (Pusponegoro & Sujudi, 2016) :

1. Fungsi normal dari masyarakat yang terkena bencana menjadi terganggu.
2. Bencana melebihi kemampuan dan mekanisme masyarakat yang terkena untuk melakukan tugas sehari-hari.
3. Bencana menyebabkan kerusakan yang cukup besar sehingga tidak mungkin bagi komunitas yang terkena untuk mengembalikan kehidupan normal tanpa bantuan dari luar atau eksternal.

2.4. Tinjauan Tentang Risiko Kerentanan Sosial

Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian (Ramli, 2013:15). Risiko memiliki makna ganda yaitu risiko dengan efek positif yang disebut kesempatan atau *opportunity* dan risiko yang membawa efek negatif yang biasa disebut dengan ancaman atau *threat*. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkannya, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko yang tinggi. Risiko sosial merupakan risiko yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Aspek sosial budaya seperti latar belakang budaya, tingkat kesejahteraan, dan pendidikan dapat menimbulkan risiko, baik risiko positif maupun risiko negatif.

Menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kerentanan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang terhadap sebuah ancaman yang terjadi. Suatu komunitas atau masyarakat dapat dikatakan rentan apabila tidak memiliki kemampuan dalam hal antisipasi dan bertahan di dalam suatu kondisi tertentu yang sifatnya mengancam (Tearfund, 2006). Menurut Awotona (1997) dalam Marbruno Habibi (2013) terdapat unsur utama dari kerentanan antara lain adalah kerentanan sosial, kerentanan kelembagaan, kerentanan sistem, kerentanan lingkungan, kerentanan ekonomi dan kerentanan yang disebabkan karena tidak mengedepankan konsep keberlanjutan (*sustainable*). Kerentanan adalah bentuk dari tingkat kerawanan masyarakat yang disebabkan karena faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan (Harjadi, 2005). Kerentanan juga dapat berupa kondisi geologis, karakteristik, hidrologis, klimatologis, biologis, sosial, geografis, ekonomi, politik, budaya di suatu wilayah yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mencapai kesiapan, mencegah dan meredam kemampuan masyarakat dalam menghadapi kondisi terburuk (Yayasan IDEP, 2007). Kerentanan juga dapat diartikan dimana suatu komunitas atau masyarakat atau kondisi geografis suatu wilayah yang memiliki masalah fisik, sosial dan jarak yang berdekatan dengan kawasan rawan bencana sehingga memiliki

kemungkinan untuk daerah tersebut mengalami kerusakan dan kehancuran yang diakibatkan oleh suatu bencana dan bahaya yang mengancam (A.W. Coburn, 1994).

Menurut teori-teori di atas, kerentanan dapat didefinisikan sebagai kumpulan situasi yang menentukan bahaya yang memiliki elemen risiko. Kemungkinan bencana meningkat dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Tingkat kerentanan fisik, sosial, lingkungan, dan ekonomi merupakan bagian dari rangkaian kerentanan. Tiga kategori kerentanan berbeda: kerentanan fisik, yaitu infrastruktur, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi. Kerentanan fisik didefinisikan sebagai tingkat kerentanan yang menggambarkan kondisi suatu area yang mencakup lokasi dan lingkungan yang terbangun. "Kerentanan fisik" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi fisik yang rentan terhadap unsur-unsur bahaya tertentu (BAKORNAS PB, 2002).

Risiko sosial terbagi menjadi beberapa bagian yaitu krisis sosial, krisis ekonomi, dan fenomena alam atau bencana.

1) Krisis sosial

Krisis sosial merupakan sebuah fenomena sosial, lebih tepatnya suatu keadaan dimana terjadinya ketidak kondusifan di lingkup kehidupan bermasyarakat, yang kemudian terkonstruknya lingkungan masyarakat yang tidak nyaman serta tidak aman. Dalam hal ini suatu elemen masyarakat cenderung terlibat dalam fenomena sosial tersebut. Dalam sederhananya krisis sosial ialah suatu gejala yang timbul daripada konstruk sosial itu sendiri, yang kemudian terjadinya beberapa penyimpangan perilaku. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi krisis sosial ini terjadi, satu diantaranya terjadinya krisis sosial budaya, dalam artian terjadinya penurunan atau hilangnya kultur masyarakat. Di samping itu ada juga faktor lain yang mempengaruhinya, katakanlah seperti hilangnya kepedulian lingkungan dan sosial, berkurangnya interaksi antar satu dengan lainnya (Hakim, 2022).

2) Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi adalah ketika ekonomi suatu negara menurun drastis. Jenis krisis ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti krisis finansial, inflasi, dan deflasi, yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara bersamaan (Dwi, 2023).

3) Fenomena Bencana Alam

Gejala alam yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia disebut fenomena bencana alam. Fenomena ini terjadi setiap saat di setiap wilayah Indonesia yang rawan bencana alam. Karena bencana alam adalah fenomena geografis yang dipermasalahkan, masyarakat dan siswa harus memahaminya. Menurut Kahfid (2016), pembelajaran geografi fisik dan ilmu bantu geografi harus dilakukan untuk memahami fenomena bencana alam secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan ini, metode studi lapangan harus digunakan.

2.5. Landasan Teori

2.5.1 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural fungsional Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya (George Ritzer, 2011).

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Teori ini beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lainnya. Teori ini mengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial ataupun struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungannya dengan komponen-komponen sosial lainnya (George Ritzer, 2011).

Dalam pembahasan mengenai teori struktural fungsional, Talcott Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa aktor individu, dimana aktor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu institusi atau lembaga. Dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan

oleh Talcott Parsons ini terdapat empat konsep yang familiar harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur dengan singkatan AGIL, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).

1). Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi adalah kemampuan suatu sistem atau struktur sosial untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Konteks ini merujuk pada bagaimana sistem sosial, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Pesawahan, menyesuaikan diri dengan kondisi yang diakibatkan oleh bencana. Ketika bencana terjadi, kebutuhan masyarakat berubah secara drastis dan sistem pemerintahan harus mampu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adaptasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu apakah pemerintah daerah dan elemen yang ikut berkontribusi dapat membuat bantuan sosial ini dapat terlaksana dengan baik, jika tidak disinilah proses adaptasi dilakukan, apakah program pemerintah daerah yang seharusnya disesuaikan atau masyarakat yang menyesuaikan program yang sudah tersedia sebagaimana mestinya dari pemerintah.

2). Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Pencapaian tujuan dari penelitian ini yaitu apakah bantuan sosial ini dapat mengatasi risiko kerentanan sosial di masyarakat. Pemerintah harus menetapkan tujuan yang jelas dalam program bantuan sosial, seperti pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dalam jangka waktu tertentu, pemulihan kondisi kesehatan masyarakat, dan stabilisasi ekonomi pasca-bencana. Apakah perencanaan dan proses yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap pemberian bantuan sosial ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan korban

bencana.

3). Integrasi (*Integration*)

Integrasi adalah suatu sistem atau struktur sosial yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengatur hubungan yang terdiri dari komponennya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengatur hubungan yang terdiri dari ketiga fungsi lainnya: perubahan, pencapaian tujuan, dan keterlambatan. Dalam konteks bantuan sosial, integrasi melibatkan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan lembaga non-pemerintah, serta partisipasi masyarakat setempat. Tanpa integrasi yang baik, program bantuan bisa menjadi tidak efisien atau bahkan gagal mencapai sarannya. Integrasi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses implementasi bantuan. Ini termasuk pelibatan masyarakat dalam pendataan korban, distribusi bantuan, serta monitoring dan evaluasi. Partisipasi masyarakat ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

4). Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Suatu sistem atau struktur sosial harus mampu mempertahankan, memperbaiki, dan melengkapi motivasi individu dan tatanan kebudayaan. Ini dikenal sebagai pemeliharaan pola. Di sini, pemeliharaan pola mengacu pada evaluasi program bantuan sosial untuk korban bencana. Jika ada manfaat bagi kehidupan korban bencana, maka pola program bantuan sosial terpelihara dengan baik. Pemerintah harus menjaga komitmen jangka panjang untuk terus mendukung korban bencana, tidak hanya selama tanggap darurat tetapi juga dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Ini termasuk memastikan keberlanjutan program bantuan

sosial, serta mengintegrasikan pelajaran dari bencana sebelumnya ke dalam perencanaan kebijakan di masa depan.

Empat konsep yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, empat konsep tersebut sangat dibutuhkan agar suatu sistem atau struktur sosial dapat terus bertahan. Selain itu sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas, sehingga akan dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Teori struktural fungsionalisme ini memfokuskan pada struktur masyarakat dan antar hubungan dari berbagai struktur tersebut yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Kajian tersebut dikonsentrasikan pada bagaimana cara masyarakat dalam mempertahankan suatu keteraturan dengan berbagai elemen. Maka, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial pada sistem atau struktur dalam suatu masyarakat. Dimana dalam sistem sosial harus ada suatu struktur yang berfungsi dengan baik dan berjalan secara terus menerus sehingga nantinya sistem tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang seimbang dan harmonis melalui empat konsep tersebut (George Ritzer & Douglas J Goodman, 2005).

2.6. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa referensi jurnal dan skripsi dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dan landasan dalam kerangka berfikir untuk dapat mengkaji suatu masalah yang dapat menjadi saran bagi peneliti didalam suatu penelitian. Penelitian terdahulu disini, selain digunakan sebagai referensi

peneliti dalam melakukan penelitian, akan digunakan sebagai perbandingan atau sebagai sarana uji teori dengan penelitian terdahulu tersebut, apakah teori yang digunakan masih relevan atau tidak. Dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlandaskan penelitian terdahulu ini, maka peneliti tidak akan keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh teori yang sudah dibuktikan dari penelitian sebelumnya. Pada intinya, penelitian terdahulu ini merupakan sarana pembandingan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya. Maka penelitian terdahulu yang digunakan sekaligus menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Jenis Publikasi	Jurnal
Nama Peneliti	Cokorda Putra Indrayana, Cok gede Agung Kusuma Putra (2022)
Judul Penelitian	Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam (Studi Penelitian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem)
Hasil Penelitian	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem telah diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan isi peraturan. Di mana proses kebijaksanaan itu sulit dan memerlukan rasa tanggung jawab yang tinggi serta keinginan untuk mengambil risiko dan mengambil inisiatif. Selain itu, ada banyak tantangan lainnya, terutama jika informasi yang dibutuhkan tidak lengkap dan bukti yang ada tidak dapat memberikan gambaran, keinginan yang berbeda antara satu sama lain, tanggapan yang tidak teratur atau sporadis, proses yang sulit dipahami, dan tidak adanya partisipasi.
Perbedaan Penelitian	Penelitian sebelumnya membahas bagaimana peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 diterapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem untuk memberikan santunan dan bantuan sosial kepada korban bencana alam kepada masyarakat. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada bagaimana bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana alam.
Jenis Publikasi	Jurnal
Nama Peneliti	Syaiful Bahri (2022)
Judul Penelitian	Pemenuhan Kebutuhan Bagi Korban Gempa Cianjur dari Pemerintah Lembaga Badan Swasta dan Masyarakat Indonesia
Hasil Penelitian	Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan saat terjadi bencana alam. Korban bencana alam membutuhkan bantuan untuk melanjutkan dan mempertahankan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang masih percaya bahwa korban gempa Cianjur menerima pemenuhan kebutuhan mereka secara tidak merata. Beberapa bantuan yang diterima adalah tenda pengungsian, makanan yang sebagian besar mie instan, dan bantuan non-makanan, seperti pakaian layak pakai, sabun, air bersih, dan obat-obatan untuk kesehatan..

Perbedaan Penelitian	Studi sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan non-tunai yang diberikan oleh pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat Indonesia terdiri dari bahan pokok, obat-obatan, dan tenda pengungsian. Bantuan ini belum secara merata diberikan. Studi ini menyelidiki bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari bantuan tunai atau uang tunai serta bahan pokok.
Jenis Publikasi	Skripsi
Nama Peneliti	Aldi Sajian (2021)
Judul Penelitian	Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan yang digunakan untuk menerapkan program BST di Kota Mataram sudah cukup efektif. Dalam hal prosedur, mereka telah melakukannya sesuai dengan mekanisme yang ada, tetapi secara keseluruhan dana bantuan tersebut tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam satu bulan. Dalam hal aspek lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), pelaksanaan program BST masih menjadi subjek perdebatan, terutama karena masalah data KPM yang masih mengandung data ganda. Ini membuat pelaksanaan program BST tidak efektif dan mungkin tidak tepat sasaran.
Perbedaan Penelitian	Studi sebelumnya menunjukkan seberapa efektif standar dan sasaran kebijakan dalam menerapkan program BST di Kota Mataram dari perspektif ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, perbaikan sebelumnya dilakukan selama pandemi COVID-19. Namun, aspek ekonomi dan sosial masyarakat akan menjadi fokus penelitian. Di sini, fokus penelitian ini adalah apakah masyarakat dapat dan mampu menjalani kehidupan seperti biasa sebelum bencana alam menghancurkan mereka dan membuat mereka kehilangan banyak hal berkat bantuan sosial.

Sumber: Dikelola Peneliti, 2023

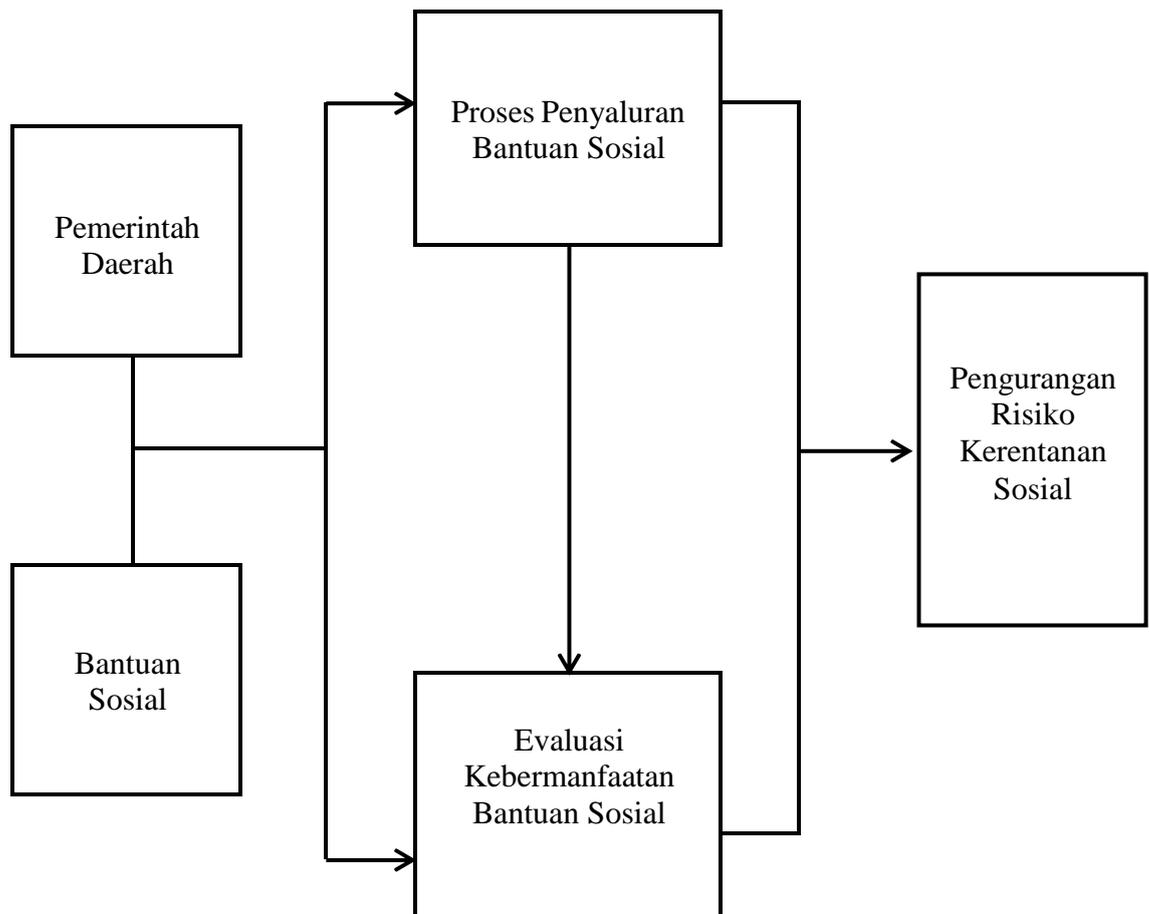
2.7. Kerangka Berpikir

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun manusia. Bencana merupakan suatu kejadian yang tidak dapat di prediksi oleh manusia. Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya bencana merupakan suatu bentuk konsentrasi bagi Pemerintah di berbagai Kota, termasuk Kota Bandar Lampung. Pentingnya lingkungan terutama lahan

bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan juga beberapa data pendukung terjadinya bencana tersebut, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui klasifikasi pengembangan pada kemampuan lahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan juga analisisnya dalam hal kebencanaan yang juga diperkuat dengan data jumlah penduduk yang telah diperoleh dan dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, di mana jumlah penduduk Kecamatan Teluk Betung Selatan selalu mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir baik dalam jumlah penduduk, maupun dalam kepadatan penduduk.

Bencana dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan konsekuensi psikologis. Bantuan sosial merupakan salah satu dari kebijakan sosial yang diberikan oleh Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan dan terkena dampak dari suatu tragedi atau musibah. Kebijakan sosial adalah suatu keputusan yang diambil untuk menangani masalah sosial. Yang dimana dengan adanya kebijakan sosial ini dapat membantu korban terdampak bencana untuk dapat memperbaiki kehidupan mereka seperti sedia kala. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah ini terdapat 2 tatanan yaitu, yang pertama proses penyaluran program bantuan sosial, lalu yang kedua setelah proses penyaluran yaitu evaluasi kebermanfaatannya dari bantuan sosial, yang dimana nantinya kedua tatanan ini mampu atau tidak mengurangi risiko kerentanan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan guna mengetahui kondisi kehidupan korban setelah terdampak bencana, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungannya di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Dalam menjelaskan alur berpikir tersebut, peneliti telah menggambarkan kerangka berpikir dalam visualisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian



III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengapa digunakannya metode penelitian kualitatif karena data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data yang hadir atau dinyatakan ada dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan berupa narasi, dan gambar atau dokumentasi. Dapat dikatakan berbeda karena penelitian kuantitatif memulai dengan data, menggunakan teori yang sudah ada sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan teori. Sedangkan penelitian kualitatif memiliki konsep atau tujuan yaitu *central phenomenon*, subyek penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami, menggambarkan, mengembangkan, dan menemukan fenomena sentral. *Central phenomenon* adalah menspesifikasikan sesuatu yang dimaksudkan untuk eksplorasi, mengidentifikasi subjek penelitian dengan jelas, dan menyebutkan lokasi penelitian dengan jelas.

Penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menyajikan data secara mendalam berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang sesuai dengan situasi di lapangan terkait dengan implementasi pemberian bantuan sosial bagi korban bencana di Kota Bandar Lampung. Dan penelitian kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan fokus permasalahan atau penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu apakah bantuan sosial yang diberikan ini bisa mengurangi risiko sosial atau kerentanan sosial pada kehidupan masyarakat atau korban yang terdampak bencana alam di Kota Bandar Lampung ini, yang dimana nantinya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, spesifikasi wilayah nya yaitu di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya bencana merupakan suatu bentuk konsentrasi bagi Pemerintah di berbagai Kota, termasuk Kota Bandar Lampung. Kelurahan Pesawahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan merupakan salah satu daerah di Kota Bandar Lampung yang rawan akan terjadinya bencana alam. Hal tersebut karena kondisi geografis, topografi dan klimatologinya.

Salah satu wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yang rentan terhadap bencana adalah Kecamatan Teluk Betung Selatan. Menurut Adrian (2016), kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana alam akan meningkat apabila konsentrasi penduduk di wilayah pesisir meningkat pula, begitu pula halnya dengan Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan yang memiliki permukiman di pesisirnya dengan kepadatan penduduk mencapai 12.466 jiwa/km² yang membuat Kecamatan Teluk Betung Selatan ini rentan terhadap bencana di daerah pesisir (Badan Pusat Statistik, 2022).

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok masalah dari sebuah penelitian. Dalam metode kualitatif, menentukan prioritas penelitian adalah tahap yang sangat penting. Pendekatan kualitatif tidak terbatas pada variabel penelitian karena fenomena yang diteliti sangat luas, menyeluruh, dan saling berhubungan. Namun, penelitian memperhatikan keseluruhan konteks sosial, termasuk elemen tempat, pelaku, dan aktivitas. Fokus penelitian penting perannya demi membatasi sebuah permasalahan dalam studi dan penelitian, sekaligus membatasi peneliti dalam memilih mana data yang relevan dan mana data

yang tidak relevan. Tanpa adanya fokus penelitian peneliti akan sulit memilih informasi yang diterima dari informan di lapangan. Karena tidak menutup kemungkinan semua informasi yang informan berikan di lapangan akan cenderung meluas dan tidak sama dan akan mengakibatkan peneliti terjebak dalam memilih informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian ini yaitu mengenai implementasi bantuan sosial, strategi yang dilakukan oleh korban bencana terhadap bantuan sosial, dan kebermanfaatannya dari bantuan sosial yang diberikan bagi kehidupan korban bencana di Kota Bandar Lampung.

3.4. Kriteria Informan

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan sejumlah informan berskala kecil, tetapi penentuan informan sangat penting untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan peneliti. Penelitian kualitatif biasanya membutuhkan lebih sedikit informan daripada jenis penelitian lainnya. Dalam penelitian ini, individu digunakan sebagai unit analisis. Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu memilih informan. Jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif, pemilihan informan berdasarkan teori atau sampel teoretis akan lebih cocok.

Teori dan praduga adalah dua elemen yang dapat digunakan dalam pemilihan informan karena keduanya didasarkan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman responden atau informan daripada pilihan acak. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti dengan proses *purposive sampling* yaitu memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya studi. Informasi yang diharapkan dari informan adalah informasi yang sesuai dengan kerangka teori dan kerangka konsep yang dipakai peneliti. Oleh karena itu, peran informan penelitian dapat ditentukan berdasarkan dua kondisi yaitu berdasarkan masalah penelitian dan

berdasarkan teori. Penentuan peran berdasarkan teori digunakan dalam penelitian untuk memperkuat atau meningkatkan dasar teori. Sedangkan tujuan dari penentuan peran informan berdasarkan masalah penelitian adalah untuk memberikan informasi yang sesuai dengan indikator masalah yang akan digali oleh peneliti. Biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi pendapat atau opini seseorang, memahami atau mempelajari perilaku seseorang, dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yang berarti memilih informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengambilan *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dari berbagai sumber data yang mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satu contoh dari pertimbangan ini adalah individu yang dianggap memiliki pengetahuan tertinggi tentang apa yang diharapkan dari mereka, atau mungkin karena statusnya sebagai penguasa yang memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat, peneliti memilih informan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Oleh karena itu, metode ini sangat cocok untuk penelitian ini. Berikut beberapa informan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Aparat desa atau pemerintah desa yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan sosial.
2. Masyarakat korban bencana penerima bantuan sosial 2 tahun terakhir.
3. Masyarakat korban bencana yang baru saja atau akan menerima bantuan sosial.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan dengan karakteristik diatas agar mendapatkan informasi yang akurat dari beberapa korban bencana yang telah mendapatkan dan baru saja mendapatkan bantuan sosial serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan dan tetap akan berfokus pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Korban bencana disini memiliki persepsinya masing-masing terkait dengan

pengalaman mereka mendapatkan bantuan sosial sehingga nantinya akan didapatkan informasi yang beragam.

Tabel 3. 1 Profil Informan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Musa Saleh	51	Lurah	Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Hidayat, No. 57, Palapa, Tanjung Karang Pusat
2.	Nur Azizah	56	Ketua RT	Jl. Ikan Sepat No. 17, RT. 47
3.	Yuniarti	60	Ibu Rumah Tangga	Jl. Ikan Kembang No. 09, RT. 44
4.	Parmin	39	Buruh	Jl. Ikan Sepat No. 21, RT. 47
5.	Ida Farida	43	Ibu Rumah Tangga	Jl. Ikan Sepat No. 13, RT. 47
6.	Nani Naira	55	Karyawan Honorer	Jl. Ikan Sepat No. 05, RT. 47
7.	Hambali	57	Buruh	Jl. Ikan Kembang No. 16, RT. 44
8.	Ida Armala	43	Pedagang	Jl. Ikan Kembang No. 11, RT. 44
9.	Supiah	50	Pedagang	Jl. Ikan Sepat No. 27, RT. 47
10.	Ita Oktarina	53	Pedagang	Jl. Ikan Kembang No. 20, RT. 44
11.	Ariyanti	45	Ibu Rumah Tangga	Jl. Ikan Sepat No. 32, RT. 47
12.	Imam	60	Pekerja Bangunan	Jl. Ikan Sepat No. 10, RT. 47

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui pengumpulan langsung oleh peneliti, seperti melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung dengan informan yang merupakan korban bencana dan pihak berwenang yang memahami bantuan sosial yang diperlukan, untuk memastikan data yang diperoleh akurat, sesuai dengan keunggulan data primer. Observasi dalam penelitian ini meliputi proses penerimaan bantuan sosial oleh korban bencana dan kondisi kehidupan masyarakat penerima bantuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang sudah terdokumentasi dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Dokumentasi yang dilakukan meliputi pengumpulan data dari aparat pemerintah atau desa yang bertanggung jawab atas bantuan sosial, data penerima bantuan, surat pengajuan kerugian dari korban bencana, serta sumber lain, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana. Selain itu, data sekunder juga dapat berupa hasil penelitian sebelumnya serta foto atau gambar yang diambil selama observasi di lokasi penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Informasi

Karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan informasi , teknik pengumpulan informasi merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan informasi yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat perilaku, kegiatan, atau keadaan yang diamati. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan seluruh

panca indra dibantu oleh media visual dan audio visual untuk mengetahui objek yang akan dijadikan penelitian tepat sasaran atau sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Spradley objek penelitian dalam kualitatif yang di observasi dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). *Place* (tempat) merupakan tahap observasi dimana peneliti mengunjungi lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian, *actor* (pelaku) adalah tahap observasi dimana peneliti melakukan wawancara bersama dengan korban penerima bantuan sosial yang terdampak bencana, dan *activities* (aktivitas) merupakan tahap observasi dimana peneliti menganalisis bagaimana aktivitas sosial korban sebelum dan sesudah terkena bencana.

2. Wawancara

Wawancara, atau yang sering disebut sebagai "interview", adalah metode penelitian di mana pewawancara berbincang dengan informan, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media tertentu. Metode ini umumnya digunakan ketika diperlukan data kualitatif. Peneliti cenderung memilih wawancara yang terencana dan terstruktur karena dalam jenis wawancara ini, pertanyaan dirancang secara menyeluruh dan sistematis dalam format yang sudah ditetapkan. Dalam wawancara langsung, diharapkan informasi yang diperoleh akan benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan. Wawancara ini harus fokus pada isu-isu utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara ini untuk mengumpulkan informasi dari informan yang memenuhi kriteria, khususnya terkait dengan bantuan sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis dari arsip-arsip, termasuk buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

Dalam penelitian kualitatif, teknik dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara. Jika hasil observasi atau wawancara didukung oleh dokumen yang relevan dengan subjek penelitian, hasilnya akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. Dokumen bisa dalam berbentuk tulisan, gambar atau arsip dalam bentuk laporan yang dapat mendukung penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam beberapa submit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat memudahkan diri sendiri dan orang lain untuk dapat memahami. Dalam penelitian ini ada tiga langkah yang ditetapkan untuk melakukan analisis data penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divalidasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih mana yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan mencarinya saat diperlukan. Dengan demikian, reduksi data dilakukan peneliti dengan memilah catatan lapangan yang berkaitan dengan pemberian bantuan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup korban bencana di Kota Bandar Lampung.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkannya. Dalam hal ini, display adalah kumpulan data yang telah disusun sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan dalam

sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif dan peristiwa masa lalu adalah bentuk display data yang paling umum. Dengan demikian, penyajian data akan menjadi lebih mudah untuk dipahami dan digunakan sebagai referensi untuk tindakan yang didasarkan pada pemahaman dan analisis data. Peneliti akan menyajikan data yang akan dianalisis dan disusun secara sistematis sehingga mempermudah pemahaman mereka tentang apa yang terjadi dalam data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang ditarik dan diverifikasi hanyalah bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu jika tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, ketika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid, maka kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang kredibel. Salah satu cara untuk melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi ini adalah dengan melakukan *crosscheck* dengan pihak lain seperti melakukan wawancara dengan aparat pemerintah setempat atau warga lain yang mengetahui pemberian bantuan sosial korban bencana tersebut untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang valid. Penelitian ini kemudian akan mencapai kesimpulan yang objektif berdasarkan data yang dikumpulkan melalui langkah-langkah di atas. Untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut tidak menyimpang dari masalah penelitian, hasil reduksi dan penampilan data akan diperiksa. Penelitian ini menampilkan hasil transkripsi dan memberikan penjelasan di bagian hasil penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten atau kota yang terdapat di Provinsi Lampung. Sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung berfungsi sebagai pusat aktivitas perekonomian dan pemerintahan di wilayah tersebut. Slogan "Ragom Gawi," yang berarti gotong royong dan kerja sama, mencerminkan semangat kolaborasi dan persatuan dalam memajukan kota ini. Pembentukan Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, yang mengubah status Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Perubahan ini, yang tercantum dalam Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254, menetapkan Bandar Lampung sebagai entitas administratif yang mandiri dan sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung.

Pada tahun 1982, Kota Bandar Lampung mengalami pemekaran wilayah dengan bergabungnya tiga kecamatan baru, yaitu Kedaton, Panjang, dan Sukarame. Sebelumnya, ketiga kecamatan ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Pemekaran wilayah ini menjadi langkah signifikan dalam pembentukan struktur administratif Kota Bandar Lampung, yang kemudian memperluas cakupan pemerintahan dan pembangunan di kota ini. Dengan integrasi kecamatan-kecamatan baru tersebut, Bandar Lampung semakin berkembang, memperkuat posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang lebih besar.

4.2. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung dan pusat aktivitas pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Lokasi geografisnya adalah pada 5 20' hingga 5 30' Lintang Selatan dan 105 28' hingga 105 37' Bujur Timur. Terletak di Teluk Betung, yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera, Bandar Lampung adalah ibu kota. Wilayah daratan sekitar 19.722 ha (197,22 km²) dan wilayah perairan sekitar 39,82 km². Sebagian besar area Kota Bandar Lampung berada pada ketinggian antara 0-500 meter, kecuali beberapa area di Kecamatan Kedaton, Tanjung Karang Barat, dan Kemiling yang berada pada ketinggian antara 500 dan 700 meter. Kota Bandar Lampung berada di lokasi strategis dari berbagai perspektif regional, nasional, dan internasional.

Bandar Lampung memiliki potensi besar dalam kerjasama ekonomi regional IMS-AFTA karena kedekatannya dengan kota-kota besar seperti Jakarta dan wilayah pertumbuhan ekonomi Jabotabek dan Jawa Barat. Hal ini menjadikannya lokasi strategis untuk pengalihan dan konsentrasi kegiatan ekonomi dari daerah-daerah tersebut. Sebagai hasilnya, Bandar Lampung berperan penting dalam proses pertumbuhan Pantai Utara Jawa serta Jawa bagian Barat. Saat ini, Kota Bandar Lampung muncul sebagai pesaing utama untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera bagian selatan. Terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, kota ini memperkuat posisinya sebagai pintu gerbang utama antara Pulau Jawa dan Sumatera. Posisi geografis yang strategis ini semakin diperkuat dengan aksesibilitas yang tinggi, termasuk melalui jalan raya Trans Sumatera, angkutan laut melalui Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang, serta jalur udara melalui Bandara Branti yang berjarak sekitar 18 km dari kota. Selain itu, Bandar Lampung memiliki posisi yang strategis terhadap objek wisata nasional dan internasional, seperti

Gunung Krakatau dan pelatihan gajah di Way Kambas (PKP Kota Bandar Lampung, 2020)

Kota Bandar Lampung memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara: Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- b) Sebelah Selatan: Teluk Lampung
- c) Sebelah Barat: Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin, Pesawaran
- d) Sebelah Timur: Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terdiri dari beberapa kecamatan yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Kepdatan Penduduk Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Teluk Betung Barat	Bakung	11,02	2.904
2	Teluk Betung Timur	Sukamaju	14,83	3.633
3	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon	3,79	11.311
4	Bumi Waras	Sukaraja	3,75	16.844
5	Panjang	Karang Maritim	15,75	5.131
6	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	2,03	21.220
7	Kedamaian	Kedamaian	8,21	7.053
8	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	4,33	12.368
9	Tanjung Karang Pusat	Palapa	4,05	13.809
10	Enggal	Enggal	3,49	8.209
11	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	14,99	4.373
12	Kemiling	Beringin Jaya	24,24	3.654
13	Langkapura	Langkapura	6,12	7.119

14	Kedaton	Kedaton	4,79	11.970
15	Rajabasa	Rajabasa	13,53	4.256
16	Tanjung Senang	Nunyai		
		Tanjung Senang	10,63	5.848
17	Labuhan Ratu	Kampung Baru Raya	7,97	6.574
18	Sukarame	Sukarame	14,75	4.592
19	Sukabumi	Sukabumi	23,6	3.215
20	Way Halim	Way Halim Permai	5,35	13.900
	Total		197,22	5.913

Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2021

Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sebesar 197,22 km² yang terbagi atas 20 kecamatan didalamnya. Luas wilayah terbesar berada pada Kecamatan Kemiling dengan angka 24,24 km² dan luas wilayah terkecil berada pada Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan angka 2,03 km². Selain itu juga, pada tabel tersebut terdapat data jumlah kepadatan penduduk per km² Kota Bandar Lampung dengan jumlah total 5.913 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan jumlah 21.220 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan jumlah 2.904 jiwa/km².

4.3. Kondisi Topografi Kota Bandar Lampung

Topografi Kota Bandar Lampung sangat bervariasi, mencakup wilayah dataran pantai hingga kawasan perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan topografi perbukitan hingga pegunungan membentang dari arah Barat ke Timur, dengan titik tertinggi berada di Gunung Betung di sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah Timur. Berikut adalah topografi dari tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung :

1. Wilayah Barat: Ini adalah daerah yang paling tinggi, dengan puncak Gunung Betung menjadi titik tertinggi. Wilayah ini umumnya terdiri dari perbukitan yang curam dan cocok untuk kegiatan wisata alam seperti pendakian.
2. Wilayah Tengah: Merupakan daerah transisi antara perbukitan di Barat dan daerah dataran rendah di Timur. Topografi di wilayah ini bervariasi dengan adanya beberapa bukit kecil dan dataran yang relatif lebih rata. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan kota.
3. Wilayah Timur: Dikenal dengan perbukitan Batu Serampok dan Gunung Dibalau, wilayah ini juga memiliki elevasi yang cukup tinggi, meski tidak setinggi di bagian Barat. Topografinya yang berbukit membuatnya cocok untuk pemukiman dengan pemandangan alam.
4. Wilayah Pantai: Di bagian Selatan, terdapat daerah dengan topografi dataran rendah yang mendekati garis pantai. Ini adalah wilayah yang lebih padat penduduknya dan berfokus pada kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan.

Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan elevasi tertinggi di Kota Bandar Lampung, dengan ketinggian maksimum mencapai 700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Di sisi lain, Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang berada di wilayah dengan ketinggian paling rendah, hanya sekitar 2 hingga 5 mdpl, menjadikannya area dengan elevasi terendah di kota ini. Kota Bandar Lampung memiliki topografi yang sangat beragam, mulai dari dataran rendah di sepanjang pantai hingga perbukitan yang menjulang tinggi. Kota ini juga dilalui oleh 23 sungai kecil, sebagian besar merupakan bagian dari daerah aliran sungai yang bermuara di Teluk Lampung. Keanekaragaman topografi ini memberikan karakteristik unik pada Kota Bandar Lampung dan mempengaruhi pola pembangunan serta aktivitas masyarakat. Sungai-sungai yang mengalir di kota ini berperan penting dalam mendukung ekosistem lokal, menyediakan berbagai manfaat seperti

air bersih, irigasi untuk pertanian, serta jalur transportasi. Kombinasi antara dataran rendah, perbukitan, dan jaringan sungai yang melintasi kota menjadikan Bandar Lampung sebagai wilayah yang dinamis dengan berbagai potensi alam dan tantangan lingkungan yang perlu dikelola dengan baik.

4.4. Gambaran Umum Wilayah Teluk Betung Selatan

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama "Onderafdeling Telukbetong," yang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1912 Nomor 462. Wilayah ini mencakup Ibukota Teluk Betung dan daerah sekitarnya. Sebelum pembentukannya pada tahun 1912, Ibukota Teluk Betung sudah mencakup Kota Tanjung Karang, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Teluk Betung. Pada masa itu, struktur administratif Hindia Belanda terbagi dalam beberapa tingkatan, di mana Onderafdeling merupakan salah satu pembagian wilayah penting. Teluk Betung dan Tanjung Karang akhirnya berkembang menjadi bagian integral dari wilayah Kota Bandar Lampung saat ini, dengan Tanjung Karang menjadi salah satu pusat administratif dan perdagangan yang penting. Meskipun Tanjung Karang adalah ibukota Onderafdeling Teluk Betung, Teluk Betung sendiri merupakan Ibu Kota Karesidenan Lampung.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung masih merupakan kota kecil dan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Keduanya kemudian dikenal sebagai Kota Tanjung Karang-Teluk Betung dan dipisahkan dari Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 mendeklarasikan Kota Besar Tanjung Karang Teluk Betung. Dengan berjalannya waktu, status kota ini diubah menjadi "Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung" melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 kemudian mengubah batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung.

Akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, terhitung sejak 17 Juni 1983, nama "Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung" resmi diganti menjadi "Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung". Perubahan ini menandai status Bandar Lampung sebagai entitas administratif yang lebih besar dan berperan penting dalam perkembangan wilayah Sumatera bagian selatan. Empat kecamatan yang ada pada saat itu adalah:

1. Kecamatan Teluk Betung Utara
2. Kecamatan Tanjung Karang Timur
3. Kecamatan Tanjung Karang Barat
4. Kecamatan Teluk Betung Selatan

Kemudian, kota ini mengalami perkembangan dan perluasan menjadi sembilan kecamatan. Berikut adalah daftar sembilan kecamatan yang ada setelah pemekaran:

1. Kecamatan Teluk Betung Utara
2. Kecamatan Tanjung Karang Timur
3. Kecamatan Tanjung Karang Barat
4. Kecamatan Teluk Betung Selatan
5. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
6. Kecamatan Teluk Betung Barat
7. Kecamatan Kedaton
8. Kecamatan Panjang
9. Kecamatan Sukarame

Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan pertumbuhan populasi dan pembangunan kota. Kecamatan Teluk Betung Selatan terdiri dari 6 kelurahan, 14 Lingkungan Kelurahan (LK), dan 141 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah sebesar 369 hektar, pusat pemerintahannya terletak di Kelurahan Gedong Pakuon.

Menurut dokumen "Kecamatan Teluk Betung Selatan dalam Angka Tahun 2020", kondisi geografis, topografi, dan klimatologi merupakan

karakteristik fisik utama wilayah ini. Secara geografis, Kecamatan Teluk Betung Selatan adalah daerah pantai yang memanjang dari timur ke barat sepanjang Teluk Lampung. Wilayah ini sebagian besar datar, terutama di sepanjang pantai, dengan sebagian kecil wilayah berbukit atau bergelombang, terutama di bagian utara.

Sebagai wilayah yang beriklim tropis, Kecamatan Teluk Betung Selatan menerima curah hujan rata-rata antara 2000 hingga 3000 mm per tahun. Berikut adalah 6 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Teluk Betung Selatan:

1. Kelurahan Gedong Pakuon - Sebagai pusat pemerintahan kecamatan.
2. Kelurahan Pesawahan
3. Kelurahan Sumur Putri
4. Kelurahan Keteguhan
5. Kelurahan Sukaraja
6. Kelurahan Gunung Sulah

Secara geografis, Kecamatan Teluk Betung Selatan terletak pada ketinggian antara 4 hingga 50 meter di atas permukaan laut, menjadikannya wilayah dataran rendah yang berlokasi dekat dengan pinggiran laut Teluk Lampung, di ujung selatan Pulau Sumatera.

Dengan pemekaran administratif yang dilakukan, jumlah kelurahan di Kota Bandar Lampung yang semula 98, bertambah menjadi 124 kelurahan, sementara jumlah kecamatan meningkat dari 13 menjadi 20. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kota.

4.5. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Pesawahan

Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, terdapat empat etnis yang hidup berdampingan dengan harmonis. Etnis-etnis tersebut adalah Palembang, Sunda, Arab, dan Tionghoa. Kehidupan mereka penuh dengan toleransi dan gotong royong, meskipun memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Etnis Palembang di daerah ini

umumnya bekerja sebagai pedagang, khususnya dalam menjual hasil bumi. Mereka terkenal dengan keterampilan berdagang yang telah diwariskan turun-temurun. Suku Sunda, yang banyak menetap di Jalan Ikan Sepat Kampung Gudang Ajen, memiliki komunitas yang erat dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, etnis Tionghoa juga merupakan bagian penting dari masyarakat Pesawahan. Mereka berperan dalam berbagai bidang usaha dan turut menjaga keharmonisan dengan etnis lain. Etnis Arab di daerah ini juga berkontribusi pada keberagaman budaya dan agama, menjadikan kehidupan sosial semakin kaya dan dinamis. Keempat etnis ini selalu hidup rukun, mengedepankan toleransi antar umat beragama, dan gotong royong. Misalnya, ketika ada anggota keluarga etnis Tionghoa yang meninggal, etnis lain turut hadir dan memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini menunjukkan betapa kuatnya rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mereka, tanpa memandang perbedaan etnis dan agama. Ketika ada anggota etnis Tionghoa yang meninggal dunia, kaum Muslim turut serta dalam tradisi yang bernama "*sangseng*," yang dimana dalam bahasa Cina berarti mengantar ke makam. Ini adalah salah satu bentuk kerukunan yang telah terjaga sejak zaman Belanda di daerah ini. Kerjasama dan saling menghormati ini menunjukkan bagaimana perbedaan agama dan etnis tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk hidup harmonis.

Teluk Betung Selatan adalah kawasan yang berkembang sebagai salah satu embrio terbentuknya Kota Bandar Lampung. Sebagai wilayah pesisir, daerah ini menjadi titik awal pertumbuhan kota yang dimulai dari kegiatan di tepi pantai seperti pelabuhan. Kelurahan Pesawahan merupakan salah satu wilayah yang berdekatan dengan laut, berjarak sekitar 1 km dari tempat pelelangan ikan (TPI) atau biasanya disebut dengan nama Gudang Lelang yang menjadi tempat sentra penjualan ikan di Bandar Lampung. Interaksi budaya juga terlihat jelas saat perayaan hari-hari besar. Ketika Imlek, etnis Tionghoa memberikan kue tutun atau kue keranjang kepada tetangga dari etnis lain. Begitu pula sebaliknya, saat perayaan Idul Fitri atau Idul Adha,

kaum Muslim memberikan makanan-makanan khas hari raya seperti rendang, opor ayam, dan ketupat kepada etnis Tionghoa. Tradisi ini mencerminkan semangat berbagi dan kebersamaan di antara mereka.

Keempat etnis ini telah menetap di wilayah Teluk Betung Selatan sejak abad ke-18 dan telah hidup rukun sejak saat itu. Sejarah migrasi etnis Palembang ke Lampung dimulai ketika mereka melarikan diri dari peperangan melawan penjajah yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II, mencari tempat yang lebih aman. Perbedaan yang ada justru menyatukan mereka dalam kehidupan sosial yang harmonis dan saling mendukung, menciptakan masyarakat yang toleran dan inklusif (Dian Ramadhan, 2023).

Tabel 4. 2Kepadatan Penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan Menurut Kelurahan 2020-2022

Teluk Betung Selatan	Kepadatan Penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan menurut Kelurahan (jiwa/km ²)		
	2020	2021	2022
Gedong Pakuon	5 101,00	13 066,67	11 417,93
Talang	9 585,00	19 524,44	16 000,65
Pesawahan	12 714,00	18 795,24	12 687,01
Teluk Betung	5 334,00	25 010,53	25 195,34
Sumur Putri	6 717,00	6 695,65	3 698,50
Gunung Mas	3 419,00	2 538,71	15 246,18

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2022

Pada tabel 4.2 diatas terlihat bahwa Kelurahan Pesawahan memiliki kepadatan penduduk cukup sedang dibandingkan dengan Kelurahan Teluk Betung. Terlihat pada tahun 2020 Kelurahan Pesawahan memiliki jumlah penduduk sebanyak 12 714,00 jiwa/km², dan pada tahun 2021 meningkat jumlahnya menjadi 18 795,24 jiwa/km². Lalu menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 12 687,01 jiwa/km².

Kelurahan Pesawahan memiliki topografi yang bervariasi, termasuk dataran rendah di dekat pantai dan daerah yang sedikit lebih tinggi di bagian yang lebih jauh dari garis pantai. Variasi topografi ini dapat mempengaruhi kerentanan terhadap banjir, terutama di daerah yang lebih rendah.

Kelurahan Pesawahan memiliki permasalahan terkait dengan banjir dan sampah. Lokasi yang dekat dengan pantai dan topografi yang bervariasi, Kelurahan Pesawahan menghadapi risiko banjir, terutama selama musim hujan. Drainase yang kurang memadai dapat memperburuk situasi ini. Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan juga menjadi tantangan, seperti halnya di banyak daerah perkotaan di Indonesia. Penumpukan sampah dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan.

4.6. Kerawanan Bencana di Kota Bandar Lampung

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana (PERKAB) tahun 2012, kerawanan bencana adalah kondisi atau karakteristik yang terdiri dari aspek geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi di suatu kawasan selama periode tertentu. Kondisi ini mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu. Salah satu bencana yang rawan terjadi di Kota Bandar Lampung adalah bencana banjir. Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan intensitas banjir yang mungkin terjadi pada suatu daerah berdasarkan pertimbangan beberapa faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi nilai kerawanan banjir yaitu, curah hujan, kemiringan lahan atau kelerengan, ketinggian lahan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Selain itu, hasil analisis dari kerapatan bangunan NDBI (*Normalized Difference Built-up Index*) juga menjadi perhitungan penting dalam menentukan kerawanan banjir. Kerapatan bangunan yang tinggi dapat mengurangi daerah resapan air dan meningkatkan risiko banjir.

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002) dalam Ritonga (2011), ada dua jenis penyebab banjir yang pertama banjir yang disebabkan oleh manusia dan yang kedua banjir yang disebabkan oleh alam. Banjir akibat aktivitas manusia seperti mengubah kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pemukiman di sekitar bantaran, kerusakan drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, kerusakan hutan (vegetasi alami), dan perencanaan banjir. Di sisi lain, banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah

hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase, dan pengaruh air pasang.

Penjumlahan indeks dalam menentukan kerentanan terhadap bencana banjir di Kota Bandar Lampung yaitu ada kerentanan fisik sebesar 25 %, kerentanan ekonomi sebesar 25%, kerentanan sosial sebesar 40%, dan kerentanan lingkungan sebesar 10 %. Dari 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung, 110 termasuk kategori kerentanan sedang, 13 termasuk kategori kerentanan rendah, dan 3 termasuk kategori kerentanan tinggi. Hasil analisis persentase kerentanan menunjukkan bahwa kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan adalah yang paling memengaruhi kerentanan total terhadap bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Kelurahan Sukabumi, Labuhan Dalam dan Pesawahan adalah 3 kelurahan yang teridentifikasi kerentanan tinggi. Skor kerentanan fisik pada masing-masing kelurahan tersebut adalah 1.00, 0.95 dan 0.79. Kemudian, skor kerentanan ekonomi juga memengaruhi hasil akhir dari nilai kerentanan total pada masing-masing kelurahan ini. Skor kerentanan ekonomi pada Kelurahan Sukabumi yaitu 0.63, Labuhan Dalam 0.79, dan Pesawahan 1.00, yang artinya secara ekonomi kelurahan Sukabumi dan Labuhan Dalam memiliki kerentanan yang relatif sedang dan kelurahan Pesawahan memiliki kerentanan yang relatif tinggi.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program bantuan sosial bagi korban bencana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program bantuan sosial bagi korban bencana ini sudah berjalan dengan baik, proses penyaluran bantuan sosial pun tidak memakan waktu yang lama. Tim yang bertanggung jawab atas penyaluran melaksanakan tugas nya dengan sangat baik. Implementasi program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka meringankan beban hidup korban bencana alam sudah berjalan sebagaimana mestinya atau bahkan bisa dibilang sangat baik. Program bantuan sosial ini diciptakan untuk membantu para korban yang terdampak bencana alam. Proses pelaksanaan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yaitu, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai dan nontunai dalam bentuk sembako. Pemberian bantuan dari pemerintah kepada korban membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari setelah terjadinya peristiwa bencana alam. Bantuan sosial dalam bentuk beras atau sembako diterima oleh lurah lalu diberikan kepada ketua RT kemudian diserahkan kepada korban bencana. Sedangkan bantuan sosial tunai diberikan langsung dari pemerintah kota dengan cara transfer langsung ke rekening korban bencana tersebut.
2. Sebagian warga yang mendapatkan bantuan sosial bencana memiliki strategi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Strategi yang dilakukan oleh warga yaitu membuat skala prioritas untuk memanfaatkan bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah. Kebermanfaatan program bantuan dirasakan warga karena hal ini membantu untuk bertahan hidup.

6.2. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas dan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat meningkatkan kinerja untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana. Pemerintah seharusnya tidak hanya membantu saat warga mengalami bencana tetapi sebelum terjadi bencana seperti membuat kebijakan untuk mengurangi resiko banjir di wilayah Gudang Agen, Kelurahan Pesawahan.
2. Masyarakat penerima bantuan sosial harus dapat membuat strategi yang untuk mengelola bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini. Jumlah bantuan yang relatif sedikit mengharuskan masyarakat dapat manajemen bantuan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan masyarakat mampu memiliki strategi antisipasi atau mitigasi bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Agar masyarakat tidak termanjakan dengan adanya bantuan sosial yang sudah pasti diberikan kepada korban terdampak bencana alam. Karena pada penelitian sebelumnya, belum adanya resistensi dari masyarakat korban penerima bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adara, R. A., & Khadijah, S. (2021). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Banjir dan Longsor. *JE (Journal of Empowerment)*, 2(1), 76-88.
- Alamsyah, D. *Implementasi Bantuan Sosial Tunai (Bst) Kepada Korban Terdampak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Warujaya Kota-Bogor* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ali, M., Luthfi, M. K., Mustopa, M., Oiwo, M. F., & Nasor, M. (2023). Pendekatan Max Weber: Birokrasi serta Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 2134-2145.
- Apriandi, I. (2017). *Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Asih, T. N. (2019). *Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proses Fabrikasi Dengan Menggunakan Metode Hirarc (Studi Kasus: Pt. Ravana Jaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- Bahri, S. (2022). Pemenuhan Kebutuhan Bagi Korban Gempa Cianjur Dari Pemerintah, Lembaga Badan Swasta Dan Masyarakat Indonesia. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 236-240.
- Christas, G. (2023). Analisis Pengaruh Intensitas Curah Hujan terhadap Luas Daerah Genangan Berpotensi Banjir di Kota Bandar Lampung.
- Christian David Timban, J. M. (2019). Efektivitas Kerja Pemerintah Kota Manado dalam Program Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Wanea Kota Manado. *E-Journal UNSRAT*, 1-11.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Dwi, A. (2023, Juni 19). Penyebab Utama Terjadinya Krisis Ekonomi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU*.
- Hakim, A. R. (2022). Kajian Isu-Isu Internasional: Krisis Sosial dan Deskriminasi Agama di Asia Tenggara. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2-8.
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30-39.
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25, 15.
- Holawarno, I. (2022). *Pendistribusian Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Dalam Rangka Mematuhi Protokol Kesehatan Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Indrayana, C. P., & Putra, C. G. A. K. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam (Studi Penelitian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 595-604.
- Indriani, E. (2018). *Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Publik Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Iskandar, I. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Social Assistance Funds Management Strategy). *Inovasi*, 14(1), 46-53.
- Ismail, A., Irfan, A., Irwan, A., Mulkim, A., & Lenas, M. N. J. (2023). Penyaluran Bantuan Bencana Dan Keterpenuhan Kebutuhan Korban Bencana Banjir Bandang Masamba. *Jurnal Abdimas Resoku*, 1(1), 5-10.
- Iswadi, M. P., Karnati, N., Ahmad Andry, B., & Adab, P. (2023). *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K. Yin*. Penerbit Adab.
- Kembuan, M. E. L., Lengkong, F. D. J., Kolondam, H., & Londa, V. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir Dikecamatan Tikala Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Khafid, S. (2016). Pemahaman Fenomena Bencana Alam Melalui Metode Studi Lapangan Dalam Geografi Fisik Sebagai Unifying Geography . *Ejournal Undiksha*, 21-34.

- Lahaling, H. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Provinsi Gorontalo. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2687-2697.
- M.Asvi, R. A. M. A. D. H. A. N. I. (2023). Analisis Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung Berbasis Gis (*Geographic Information System*) Dan Citra Landsat 8 Oli. *Universitas Lampung*. 1-60
- Rahmadi, W. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Mamuju Implementation Of Local Government Policies In The Rehabilitation And Reconstruction Program For Earthquake Disaster Victims In Mamuju Regency* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ramadhan, D. (2023, Desember 24). *Akulturasi Budaya Empat Etnis Hidup Rukun di Kelurahan Pesawahan Telukbetung*. Retrieved Mei 24, 2024, from NU Online Lampung: <https://lampung.nu.or.id/pernik/akulturasi-budaya-empat-etnis-hidup-rukun-di-kelurahan-pesawahan-telukbetung-4Kxdf>
- Saksono, E. H. (2023). *Kota Bandar Lampung Dalam Angka Bandar Lampung Municipality in Figures 2023*. Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung.
- Sari, Y. R. (2020). BAB 2 Tinjauan Pustaka. *Repository Universitas Aisyiyah Surakarta*, 21.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1059-1068.
- Suryani, A. S. (2017). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan Lingkungan Bagi Penyintas Bencana Studi di Provinsi Riau dan Jawa Tengah. *Jurnal Aspirasi*, 8(1), 55-76.
- Susanti, D. (2022). *Peran Penghayat Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal Dalam Melestarikan Tradisi Suran Di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Teguh, A. W. (2018). *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene Di Atas Kapal Mt. Bauhinia* (Doctoral Dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).
- Tjahjono, H., Suripin, S., & Kismartini, K. (2019). *Analisis Spasial Risiko Longsoran Dan Pengelolaan Risiko Bencana Longsoran Berbasis Masyarakat Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, School of Postgraduate Studies).
- Wati, H. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung.